

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DKI Didesak Biayai Siswa Pemegang KJP Tak Lolos PPDB

○ Perwakilan Ortu Murid Demo di Balai Kota

GAMBIR (Pos Kota) -Sejumlah perwakilan orang tua murid yang tergabung dalam Relawan Advokasi Pendidikan Indonesia (RAPI) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta membiayai para siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Kami ingin meminta kepastian dari Bapak Gubernur agar siswa miskin KJP bisa melanjutkan ke SMP, SMA, SMK dengan biaya yang dibantu oleh Pemprov," ujar Ketua Nasional RAPI Syah Dinihari, di depan Balai Kota DKI, Senin (13/7).

Syah menyebut, pihaknya saat ini sudah mengetahui sudah ada rencana dari Pemprov DKI mengenai rencana siswa tidak mampu akan dibiayai. "Kami tahu ada program bantuan itu dan bisa dimasukkan dan udah ada kesepakatan itu dan agar dapat direalisasikan," katanya.

Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa bersama anak-anaknya menyambangi DPRD DKI Jakarta untuk mengadu soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020.

Mereka mengeluhkan anak mereka yang gagal ke sekolah negeri karena terganjal faktor usia. Padahal, nilai anak mereka di atas rata-rata.

"Zonasi itu ya dipilih karena usia. Jadi jalur KJP mental, zonasi mental, nilai mental, karena akreditasi sekolah anak saya 92," ujar salah satu orang tua siswa Lusiana di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan akan minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membiayai siswa tidak mampu yang gagal PPDB DKI.

"Kepada Pemprov DKI bukan lagi Dinas Pendidikan, tapi Pemprov DKI kepada Pak Gubernur untuk bertanggung jawab dan juga membiayai sekolah anak-anak yang tidak mampu yang terpaksa harus masuk swasta," kata Zita. (yono/ta)